

**EVALUASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN
JALAN KHUSUS
(Studi Kasus: Jalan Khusus Angkutan Batu Bara di Kabupaten
Batang Hari Tahun 2022-2025)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*

Oleh:

**LIZA FITRIA KISNANDA
BP. 2110832029**



Dosen Pembimbing:

- 1. Dewi Anggraini, S.IP., M.Si**
- 2. Andhik Beni Saputra, S.IP., MA**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan khusus merupakan upaya mengatur lalu lintas angkutan batu bara. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan, khususnya di daerah Kabupaten Batang Hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2015. Permasalahan utama yang diangkat adalah belum terwujudnya jalan khusus angkutan batu bara secara optimal, meskipun kebijakan ini telah ditetapkan sejak tahun 2015. Fenomena penggunaan jalan nasional sebagai jalur utama truk batu bara menyebabkan berbagai persoalan serius, seperti kemacetan berkepanjangan, kerusakan infrastruktur jalan, polusi udara, kecelakaan lalu lintas, ngga keresahan sosial di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam serta dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan teori evaluasi kebijakan Riant Nugroho, yang mencakup enam kriteria: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tersebut tidak efektif karena hingga saat ini jalan khusus tersebut belum terselesaikan, sehingga masalah di jalan umum tidak teratasi. Kebijakan ini belum efisien karena masih terbatasnya pendanaan dan ketergantungan pada investor dalam pembangunan jalan khusus. Berdasarkan kecukupan kebijakan ini belum cukup dalam memenuhi kebutuhan seluruh pihak terdampak. Pemerataan manfaat dari kebijakan belum dirasa merata oleh masyarakat. Responsivitas pemerintah terhadap masyarakat masih rendah. Ketepatan kebijakan ini sudah tepat secara substansi, namun lemah dalam penerapannya. Oleh karena itu butuh meninjau ulang dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan guna mendorong percepatan pembangunan jalan khusus secara tuntas.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Jalan Khusus, Angkutan Batu Bara



ABSTRACT

The Regional Regulation of Jambi Province Number 1 of 2015 on the Provision of Special Roads is an effort to regulate coal transportation traffic. However, its implementation still faces various obstacles in the field, particularly in Batang Hari Regency. This study aims to evaluate the effectiveness of the regulation. The main issue raised is the delayed realization of dedicated coal transport roads, despite the policy having been in place since 2015. The use of national roads as the primary route for coal trucks has caused serious problems, such as prolonged traffic congestion, road infrastructure damage, air pollution, traffic accidents, and social unrest. This research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews and documentation. The analysis is based on Riant Nugroho's policy evaluation theory, which includes six criteria: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The findings indicate that the policy is ineffective, as the special road has yet to be completed, resulting in continued problems on public roads. It is also inefficient due to limited funding and reliance on private investors. In terms of adequacy, the policy fails to fully meet the needs of all affected parties. The benefits have not been equitably distributed among the public. Government responsiveness to community concerns remains low. Although the policy is substantively appropriate, its implementation is weak. Therefore, a policy review and stronger coordination among stakeholders are needed to accelerate the completion of the special road project.

Keywords : Policy Evaluation, Special Road, Coal Transportation

